**TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM GISA (GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DKP3A) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**AYU FEBRYANTI DARMAWAN**

**16.11.1001.3509.063**

**ABSTRAK**

Ayu Febryanti Darmawan NPM 16.11.1001.3509.063. Review of the Implementation of the GISA Program (Movement of Indonesia Conscious Population Administration) At the Office of the DKP3A of East Kalimantan Province, this study aims to review the implementation of the GISA program at the Department of Population, Women's Empowerment and Child Protection of East Kalimantan Province. This research is a descriptive study using a qualitative approach. Data collection techniques are done by observation, interview, and documentation.

 The informants in this study were the Head of Section for Population Registration Apparatus Development at the Population, Women's Empowerment and Child Protection Department of East Kalimantan Province as the main informant, as well as 5 community recipients of the GISA program. Data analysis techniques used are divided into several stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. While checking the validity of the data is done by triangulating sources.

 This study reviewed the implementation of the GISA program in the Department of Population, Women's Empowerment and Child Protection in East Kalimantan Province assessed from the dimension of being aware of the importance of population documents, being aware of population data utilization, being aware of updating population data, being aware of the importance of population administration that makes people happy. Based on (1) the conscious dimension of the importance of population documents, the level of public awareness has begun to increase considering population documents are very important to facilitate all matters of affairs, (2) the conscious dimension of population data utilization, utilization of population data is needed to facilitate matters and now the public easily uses , (3) the conscious dimension of data updating, the updating of data is still being improved for the convenience of the public and the government to collect data to prevent duplicate data, by continuing to socialize data updating so that data differences do not occur in the field, (4) the conscious dimension to the importance of happy population administration the people, the government keeps trying to do well to make things easier to take care of documents and improve services.

Keywords: implementation, DKP3A

**ABSTRACT**

 Ayu Febryanti Darmawan NPM 16.11.1001.3509.063. Tinjauan Tentang Implementasi Program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) Pada Kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi program GISA di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

 Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sebagai informan utama, serta 5 orang masyarakat penerima program GISA. Teknik analisis data yang digunakan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber.

 Penelitian ini meninjau implementasi proram GISA di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Provinsi Kalimantan Timur dinilai dari dimensi sadar pentingnya dokumen kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan, sadar pemuktahiran data kependudukan, sadar terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat. Berdasarkan (1) dimensi sadar pentingnya dokumen kependudukan, tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat mengingat dokumen kependudukan sangatlah penting untuk memudahkan segala sesuatu urusan, (2) dimensi sadar pemanfaatan data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan sangatlah dibuthkan untuk memudahkan urusan dan sekarang masyarakat dengan mudah memanfaatkan, (3) dimensi sadar pemuktahiran data, pemuktahiran data masih terus ditingkatkan demi kemudahan masyarakat dan pemerintah untuk mendata agar tidak terjadi data ganda, dengan terus mensosialisasikan pemuktahiran data agar tidak terjadi perbedaan data dilapangan, (4) dimensi sadar terhadap pentingya administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat,pemerintah terus berupaya melaksanakan dengan baik untuk memudahkan segala sesuatu untuk mengurus dokumen dan meningkatkan pelayanan.

Kata kunci : Impelementasi, DKP3A

1. **PENDAHULUAN**

***Latar Belakang***

Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan. Dari beberapa instansi yang terkait, DepartemenDalam Negeri merupakan *lendingsector* dalam urusan kependudukan. Kebijakan departemen inilah yang merefleksikan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia.

Birokrasi pemerintah menempati posisi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan salah satu instrument penting yang akan menopang dan memperlancar usaha-usaha pembangunan.

Pelayanan publik sangat erat dengan birokrasi. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, guna meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat, pemerintah membuat sebuah kebijakan publik melalui sebuah program.

Program meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya tata tertib administrasi kependudukan. Pemerintah provinsi melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ProvinsiKalimantan Timur.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ProvinsiKalimantanTimurme-*launching*GerakanIndonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang di gelar di Lamin Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Latar belakang program ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor:470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) ditunjukan pada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Sebagai program nasional yang dicanangkan Kementrian Dalam Negeri guna meningkatkan kesadaran pada 4 aspek, yakni: sadar pentingnya dokumen kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, serta sadar terhadap pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

***Rumusan Masalah***

Pelayanan publik adalah salah satu bentuk pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui program-program yang sudah disusun secara rinci. Dengan demikian rumusan masalah adalah pertanyaan tentang bagaimana mencari faktor penyebab atau independen variabel.

Maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanaimplementasiprogram GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) pada Kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur?”

***Tujuan Penelitian***

Mengenai tujuan penelitian penulis dapat mengemukakan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan tentang implementasi program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) pada Kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.

1. **KERANGKA DASAR TEORI**

***Kebijakan***

 Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke empat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir serta pandai bercakap-cakap.

# *Kebijakan Publik*

# Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

# James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

# Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan, hal penting yang turut diwaspadai dan diantisipasi dalam pembuatan kebijakan publik adalah kesalahan umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah:

# Terdapat pengaruh tekanan-tekanan dari luar

# Tidak jarang ditemukan atau didengar lewat berbagai media, serta suatu kebijakan yang diambil berada dalam tekanan atau pengaruh asing.

# Pengaruh kebiasaan lama

# Menurut Nigro, kebiasaan lama sebuah organisasi berpengaruh dalam pengambilan atau sering disebut sebagai istilah *sunk cost,* misalnya kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan tidak jarang birokratik, cenderung diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meski keputusan/kebijakan yang berkaitan tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu untuk diubah. Kebiasaan lama seperti ini sering secara terus menerus diikuti, terlebih suatu kebijakan tersebut dipandang memuaskan.

# Pengaruh sifat-sifat pribadi

# Beberapa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan cukup banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam menentukan keputusan/kebijakan.

# Pengaruh dari kelompok luar

# Lingkugan sosial turut mempengaruhi dalam pembuatan atau penyusunan kebijakan.

# Pengaruh pada keadaan masa lalu

# Yang dimaksud tentang keadaan masa lalu adalah pengalaman latihan dan pengalaman sejarah yang terdahulu cukup berpegaruh terhadap pembuatan sebuah kebijakan, misalnya orang yang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena ada kekhawatiran disalahgunakan (Suharno: 2010:52-53).

# Tujuan kebijakan publik adalah sebagai berikut.

# Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi

# Dapat membentuk masyarakat hukum

# Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia

1. Dapat membentuk masyarakat madani

# *Teori Implementasi*

# Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

# Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapatahapan yakni:

# Tahapan pengesahan peraturan perundangan.

# Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

# Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

# Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

# Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.

# Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

# Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

# Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

# Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

# Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

# *Implementasi Kebijakan Publik*

# Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

# Menurut Nugroho (2014:657), “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.”

# Mulyadi (2015:26) menyatakan, “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.”

# *Program GISA*

Program meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Pemerintah provinsi melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim me-*launching* Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang di gelar di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim.

*Launcing* GISA juga dibuka pelayanan perekaman dan percetakan KTP-el untuk warga se-Kaltim dan diluar Kaltim untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan terutama identitas KTP-el. Pelayanan perekaman dan percetakan selama 2 hari pada tanggal 29-30 Agustus 2018 pukul 08.00-16.00 wita di Gedung Olah Bebaya.

Sasaran GISA adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur dibidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib administrasi yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing yang di prioritaskan.

1. **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Impementasi Program Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim yang optimal sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif peneliti dapat lebih menggambarkan gejala-gejala atau fenomena sosial yang ditemui di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim ,Staff dan beberapa masyarakat penerima program GISA. Dengan teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Lalu melakukan teknik analisa data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan data. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu : (1)Sadar pentingnya dokumen kependudukan(2)Sadar pemanfaatan data kependudukan(3)Sadar pemutakhiran data kependudukan(4)Sadar terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam menjalankan sebuah program pada dasarnya semua ingin selalu berhasil atau sukses sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mewujudkan itu ada beberapa faktor pendukung yang harus dilaksanakan akan tetapi ada juga penghambat yang akan dihadapi dalam menjalankan program tersebut. Ini juga terjadi pada program GISA yang dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

* SadarPentingnya Dokumen Kependudukan

Hal pertama yang menjadi fokus penelitian ini adalah sadar pentingnya dokumen kependudukan, kesadaran ini sangat diperlukan apalagi dimasa sekarang yang untuk mengurus sesuatu yang banyak sekali membutuhkan dokumen sebagai pelengkap oleh karena itu dilihat dari hasil penelitian diatas dalam wawancara pada Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

dan beberapa masyarakat dapat disimpulkan tingkat kesadaran masayarakat Kalimantan Timur sudah meningkat pesat, masyarakat sudah sangat sadar dengan dokumen kependudukan.

* Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan

Hal kedua yang menjadi fokus penelitian ini adalah sadar pemanfaatan data kependudukan, dalam hal ini pemanfaatan data kependudukan sangat digunakan,contohnya pada wawancara diatas dengan hanya memanfaatkan NIK sudah bisa mempermudah layanan dirumah sakit, dengan begitu layanan yang biasa terhambat karena harus mencari data bisa dipermudah dengan pemanfaatan data kependudukan. Kesadaran masayarakat dalam pemanfaatan data kependudukan ini juga diperlukan dan terus meningkat karena bisa dipahami juga bahwa sekarang data kependudukan sangat dimanfaatkan dalam segala urusan.

* Sadar Pemuktahiran Data Kependudukan

Hal ketiga yang menjadi fokus penelitian ini adalah sadar pemuktahiran data kependudukan, dalam wawancara pada penelitian diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat kesadaran sudah meingkat tetapi masih ada juga yang belum terlalu paham akan pemuktahiran data itu diperlukan karena jika kita tidak selalu meng-*update* data kependudukan, akan menyulitkan dan akan terjadi data ganda atau data yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Tetapi pemerintah sudah giat untuk mensosialisasikan untuk meingkatkan kesadaran masyarakat.

* Sadar Terhadap Pentignya Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Rakyat

Hal terakhir dalam fokus program ini adalah sadar terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat dalam wawancara pada penelitian diatas ditunujukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah menigkat dengan diiringi kemudahan dari pemerintah yang sudah memudahkan jika ingin mengurus segalanya dan tanpa dipungut biaya (gratis), selain itu pemerintah juga meningkatkan pelayanan untuk membahagiakan rakyat ketika mengurus dokumen kependudukan selain itu juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Pada tingkat kesadaran masyarakat pun jadi meningkat dengan program yang dijalankan untuk membahagiakan rakyat.

1. **PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelunya peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Sadar pentingnya dokumen kependudukan dalam implementasi program GISA sudah sangat meningkat dengan menunjukkan data yang ada, dengan pentingnya dokumen kependudukan untuk memudahkan urusan masyarakat.
2. Sadar pemanfaatan data kependudukan dalam implementasi program GISA ini sudah signifikan dengan sadarnya akan manfaat dan pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat.
3. Sadar pemuktahiran data kependudukan dalam program GISA masih harus ada kesadaran masyarakat tetapi dalam hal ini pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk pemuktakhiran data agar tidak ada perbedaan data kependudukan dilapangan.
4. Sadar terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat ditunjukkan dengan program pemerintah yang sudah sangat memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan dan tanpa biaya

serta terus meningkatkan pelayanan.

***Saran***

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan giat melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana pendukung program Gisa dengan memperbanyak alat perekaman dan blanko KTP-el serta memperbaiki akses jaringan.
3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memudahkan dan membantu masyarakat tanpa memungut biaya dan pelayanan yang ramah.
4. Perlu dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-kaltim untuk mewujudkan kesadaran masyarakat tentang dokumen kependudukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

***Buku***

Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Anggara,Sahya. 2014.*KebijakanPublik, Bandung*: CVPustakaSetia,

Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung

Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis, dan Partisipasi.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Kharisma Perempuan*,* edisi 2015, *HUT BPPKB Kaltim ke- 6 Tahun 2015*

Lester, dan Stewart. 2014. *Pengertian Implementasi*.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo

Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

***Peraturan & Dokumen***

[*Undang-Undang (UU) Nomor  12 Tahun 2006* Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.](https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/UU_no_12_thn_2006.pdf)

[*Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006* Tentang Administrasi Kependudukan.](https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/UU_no_23_thn_2006.pdf)

[*Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009* Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.](https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/UU_no_52_thn_2009.pdf)

[*Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013* Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.](https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/UU_no_24_thn_2013.pdf)

*Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Adminstrasi Kependudukan*

***Sumber Internet***

<https://sipp.menpan.go.id/sektor/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/peraturan-terkait-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia> ( diakses 12 januari 2020)

<https://www.cekkembali.com/kebijakan-publik/> (diakses 14 januari 2020 )

<https://kaltimprov.go.id/berita/launching-gisa-di-provinsi-kaltim-lamin-etam-diserbu-warga> (diakses 14 januari 2020 )

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/> (diakses 21 februari 2020 )

<https://seputarilmu.com/2018/12/kebijakan-publik.html> ( diakses 01 maret 2020 )

<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/> ( diakses 04 mei 2020 )

<http://moestopo.ac.id/> ( diakses 04 mei 2020 )